

GERAKAN ISLAM POLITIK FUNDAMENTALIS: KASUS HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI SURABAYA

Rakhmat Nur Hakim

Universitas Airlangga Surabaya
hakimurrahmat@gmail.com

Abstract

This study aims to qualitatively describe the political conditions that underlie the development of the movement of HizbutTahrir Indonesia (HTI) in Surabaya, ranging from mobilization to the framing which is done to maintain the continuity of the movement. Hizbut Tahrir is one of the movements of Islamic fundamentalism which exists and shows its rapid development in Indonesia. The organization is growing in several main cities, like Surabaya, where a number of universities with excellent quality are located. This article also explains the emergence and development of this movement using social movements theory. The analysis shows that; *first*, the emergence and establishment of Hizbut Tahrir are influenced by political structures; *second*, there is a such mobilization and awareness for the framing process, namely a social attribute and awareness of its members in a number of their collective actions.

Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic fundamentalism, Islamic political movement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif tentang kondisi politik yang mendasari pengembangan Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya, mulai dari mobilisasi sampai framing, yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan gerakan. Hizbut Tahrir adalah salah satu gerakan fundamentalisme Islam yang masih eksis dan menunjukkan perkembangannya di Indonesia. Organisasi ini berkembang di kota-kota yang memiliki Perguruan Tinggi Negeri dengan kualitas yang sangat baik. Surabaya salah satu di antaranya. Tulisan ini juga menjelaskan kemunculan dan perkembangan gerakan tersebut dengan menggunakan teori gerakan sosial. Analisis menunjukkan bahwa, *pertama*, dari kemunculannya, Hizbut Tahrir dipengaruhi oleh struktur politik. *Kedua*, terdapat mobilisasi dan kesadaran mereka untuk proses framing, yaitu sebagai atribut sosial dan kesadaran anggota mereka dalam tindakan kolektif.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, fundamentalisme Islam, gerakan politik Islam

Pendahuluan

Runtuhnya Rezim Orde Baru menandakan lahirnya era demokratisasi di Indonesia. Kelompok yang berbasis identitas mulai bebas menyuarakan kepentingannya. Salah satunya ialah kelompok Islam. Kelompok-kelompok Islam memiliki kesempatan terbuka untuk menyuarakan kepentingannya, khususnya dalam sistem politik Indonesia. Kelompok ini kemudian dikenal pula dengan istilah Islam Politik. Yaitu kelompok yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai Islam dalam sistem kepartaian maupun non kepartaian.

Mereka yang memperjuangkan penegakan syariat Islam melalui jalur non kepartaian cukup leluasa dalam menjalankan aktivisme gerakan. Upaya tersebut ditempuh karena mereka menganggap sistem demokrasi adalah sistem kufur, atau tidak berlandaskan syariat Islam. Mendirikan partai dan berkon-testasi dalam pemilu sama saja mengakui tegaknya sistem kufur tersebut. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI tergolong gerakan Islam fundamentalis sebab dalam bukunya "*Sistem Politik Indonesia*" Marijan menyatakan bahwa HTI ingin menegakkan Islam di Indonesia dengan syariah komprehensif dan menolak mentah-mentah demokrasi.

HTI memiliki kaderisasi yang sistematis di perkotaan (Marijan, 2010: 324). Jumlah keanggotaannya di Indonesia sekitar sepuluh ribuan orang (Fealy dan Bubalo, 2005: 74). Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring berjalannya waktu. Sebab data tersebut dirilis pada tahun 2005. Perkembangan HTI yang cukup pesat tersebut tak lepas dari peran dakwah kampus sebagai salah satu basis kaderisasi hati. Seperti yang kita ketahui HTI pada awalnya menyebarkan ide-idenya lewat beberapa kelompok pengajian kecil di Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemudian berkembang ke kampus-kampus besar lainnya seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Air-

langga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan lain-lain.

Karenanya, Hizbut Tahrir cenderung mengalami perkembangan yang pesat di kota-kota yang memiliki kampus ternama. Surabaya merupakan salah satunya. Ada dua kampus negeri besar di Surabaya yaitu Unair dan ITS. Gerakan HTI di Surabaya juga banyak dilakukan oleh para kadernya yang berasal dari kampus-kampus tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini akan menjawab pertanyaan: *pertama*, kondisi politik seperti apa yang melatarbelakangi kemunculan dan format mobilisasi gerakan HTI Surabaya?; *Kedua*, bagaimana HTI Surabaya memobilisasi gerakannya di era reformasi?; *Ketiga*, apa yang menopang kesadaran mobilisasi para aktor gerakan HTI Surabaya sehingga dapat terus berlanjut di era reformasi?

Gerakan Sosial & Tipologinya

Istilah gerakan sosial muncul pertama kali dalam studi mengenai aksi kolektif. Yaitu studi dalam bidang psikologi sosial yang membahas fenomena berbagai bentuk aksi kolektif yang terjadi di masyarakat lewat sudut pandang psikologi. Wilkinson (1978: 12) mengartikan gerakan sosial sebagai “usaha kolektif yang disengaja untuk mempromosikan perubahan dalam suatu cara dan maksud, tidak mengecualikan kekerasan kelegalan, revolusi, atau kemunduran menuju komunitas utopis.”

Lebih jauh lagi Wilkinson menyatakan bahwa gerakan sosial juga menunjukkan sebagai aksi kolektif yang terorganisir. Tidak seperti kerumunan yang tanpa tujuan dan kesadaran bersama para aktornya. Masih menurut Wilkinson, Gerakan sosial juga muncul karena suatu sebab yaitu sebuah komitmen untuk mengubah keadaan berdasarkan kesadaran dan harapannya.

Gerakan Sosial sebagai Upaya Politik

Snow dan Soule (2010: 56) mengatakan bahwa gerakan sosial memiliki lima elemen yaitu sebagai berikut :

Pertama, gerakan sosial senantiasa menentang atau mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. *Kedua*, mereka kecenderungan bersifat kolektif daripada individual. *Ketiga*, mereka bertindak dalam tingkatan yang berbeda-beda di luar institusi sosial dan organisasi formal. *Keempat*, mereka bergerak melalui tingkatan organisasi yang berbeda-beda. *Kelima*, mereka bergerak secara kontinyu dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Berdasarkan kelima elemen tersebut, Snow dan Soule mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif dengan variasi derajat keorganisasian, dan kontinuitas, sebagian berada di luar institusi formal dengan tujuan menentang sistem atau kekuasaan yang ada dan berusaha menggantinya dengan suatu sistem sosial dan kultur baru yang telah tertanam dalam kelompok mereka.

Sebenarnya dari pemaparan Snow dan Soule di atas, bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan salah satu upaya politik. Secara jelas, Snow dan Soule mengartikan gerakan sosial sebagai kelompok yang menentang kekuasaan dan berupaya merubah sistem dari kekuasaan yang ada sesuai harapan mereka. Namun itu semua dilakukan dalam kerangka nonkonstitusional. Artinya, hal tersebut dilakukan dengan tidak memasuki sistem politik formal melalui jalur pemilu dan parlemen. Biasanya aksi kolektifnya dilakukan dalam bentuk demonstrasi, penandatanganan petisi dan lainnya, dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik hingga sepakat dengan sesuatu yang ditawarkan oleh gerakan tersebut. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh McAdam, Tarrow dan Tilly sebagai politik perseteruan yang bersifat publik (Wiktrowich, 2012: 280).

Gerakan Sosial Berbasis Religi

Zald menyatakan bahwa pengaruh religi dalam kehidupan sosial semakin kuat (Snow dan Soule, 2010: 694). Zald mengatakan pula bahwa religi merupakan salah satu institusi yang memfasilitasi gerakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu Zald mengatakan pula bahwa sosiologi agama dan sosiologi gerakan sosial dapat dipadukan dalam kesatuan pembahasan. Terutama sejak 1981, proses dalam penulisan literatur gerakan sosial semakin meningkat. Khususnya perbincangan mengenai peranan kultur dan ideologi dalam gerakan sosial. Terjadi banyak perbincangan pula yang mengaitkan hubungan antara religi dan gerakan sosial yang semakin meluas.

Ditambah pula dengan kemunculan fenomena sekularisasi politik yang semakin meluas, justru semakin menambah kemunculan gerakan sosial berbasis agama. Misalnya, kebangkitan ambisi politik fundamentalis di Iran, Afghanistan, dan sepanjang Dunia Arab. Tetapi gerakan fundamentalis juga muncul pada religi di belahan dunia timur seperti Hinduisme dan Shikhisme. Berikutnya, gerakan fundamentalis dipandang sebagai konsep yang menentang dalam studi gerakan sosial.

Istilah fundamentalis lekat dengan asosiasi kekerasan dan teror. Sebenarnya pengartian fundamentalis ialah upaya-upaya yang berkaitan dengan pengembalian kepada kepercayaan dasar. Namun kemudian makna ini bergeser pada pemaknaan pejoratif barat yaitu sebagai bentuk-bentuk aktivisme Islam yang meneror. Sehingga fundamentalis tidak selalu bermakna teror. Fundamentalis dapat disejajarkan dengan istilah Islamis.

Gerakan Islam Politik Fundamentalis

Penulis meminjam istilah dari Masdar Hilmy, gerakan Islam politik atau gerakan Islamis secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai ideologi. Artinya, mereka memandang Islam bukanlah semata-mata agama ritual. Bagi mereka, Islam adalah sebuah tatanan nilai yang mengatur jalannya seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari hubungan

antara manusia dengan Tuhannya sehingga ke aspek sosial seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.

Hampir seluruh gerakan Islamis berangkat dari pemikiran *salafi*. Yaitu pemikiran yang mencoba mengembalikan Islam pada sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber yang paripurna dalam Islam. Sebab Tuhan dan Nabi tak mungkin salah. Gerakan *salafi* ini muncul akibat berkembangnya tradisionalisme Islam yang mengagumkan ulama-ulama tradisional daripada dua sumber utama tersebut.

Fenomena gerakan Islamis muncul dalam dua arus utama Islam yaitu Sunni dan Syiah. Gerakan Islamis Syiah lebih dahulu menunjukkan kesuksesannya dalam menggulingkan rezim sekuler Syah Pahlevi. Mereka menggantinya dengan negara Islam yang dipimpin ulama kharismatik, Ayatullah Khomeini. Sementara gerakan Islamis Sunni dipimpin oleh kalangan intelektual yang bukan ulama. Contohnya adalah Ikhwanul Muslimin (IM) yang dipimpin oleh Hasan Al Banna dan Hizbut Tahrir (HT) yang dipimpin oleh Taqiyudhin An Nabhani. Gerakan Islamis Sunni inilah yang kemudian membawa pengaruh besar dalam penyebaran gerakan Islamis di seluruh dunia.

Gerakan Islamis Sunni berangkat dari pemahaman Al Qur'an dan sunnah secara politik. Di dalam Al Qur'an misalnya terdapat beberapa ayat yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang diperbolehkan membuat hukum dan dilarang memberikan ketaatan kepada pemimpin yang bukan Islam. Pemimpin yang bukan Islam diartikan sebagai pemimpin yang tidak memperjuangkan ideologi Islam tentunya.

Tafsiran Al Qur'an tersebut diperkuat dengan pemahaman sunnah yang dipahami secara politik pula. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfungsi menyeru ke dalam ajaran-ajaran Islam. Tetapi dakwah rasul juga bertujuan untuk merebut kekuasaan dari orang-orang kafir lalu menggantinya dengan kekuasaan Islam, yang menjadikan nilai Islam sebagai landasannya.

Teori Gerakan Sosial Doug McAdam

McAdam menyatakan bahwa gerakan sosial dapat berlangsung dengan mempertimbangkan *political opportunity structure* (POS) yang ada. Selanjutnya gerakan yang telah muncul akan mengorganisir sumber dayanya untuk memobilisasi sumber dayanya dalam melakukan serangkaian aksi kolektif. Berikutnya gerakan akan terus bertahan dengan adanya *proscultural framing* dari aktor gerakan kepada seluruh anggotanya untuk terus memperjuangkan cita-cita bersama melalui gerakan sosial tersebut. Oleh karena itu kerangka ini dikenal dengan teori *political opportunity structure* (POS), *Resources mobilization theory* (RMT), dan *cultural framing*.

Dalam PPM gerakan sosial muncul dan berkembang sebagai suatu hal yang disadari penuh oleh aktornya. Sejak awal mereka berupaya menentang otoritas kekuasaan yang ada. Mereka pun membangun kesadaran kolektif serta memobilisasi sumber dayanya. Dengan tujuan mengintervensi otoritas politik formal seperti negara, untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Dan mereka mampu berkelindan dengan struktur yang ada. Oleh karena itu kerangka teori McAdam lebih relevan mendeskripsikan fenomena HTI di Surabaya. Sebab HTI secara tegas mengatakan bahwa mereka bukan sekedar gerakan sosial semata namun juga mengarah ke politik. Sehingga upaya mobilisasi yang dilakukan HTI merupakan upaya politik menentang otoritas rezim.

Oleh karenanya, penulis memandang gerakan sosial tersebut bagian dari upaya politik, atau sebagai bentuk per-seteruan politik antara aktor gerakan dengan rezim. Sebab subjek yang diteliti merupakan suatu gerakan sosial yang memiliki cita-cita religio politik.

Kontekstualisasi Gerakan HTI Surabaya; Sebelum dan Sesudah Reformasi

HTI masuk ke Indonesia melalui salah satu tokohnya yang waktu itu sedang berada di Indonesia. Ia adalah Abdurrahman

Al Baghdadi, salah seorang tokoh HTI di Australia. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Fikri, Ketua *Lajna Fa'aliyah* HTI Jawa Timur.

“Ketika itu sekitar tahun 1982 atau 1983an, Ustad Abdurrahman Al Baghdadi itulah sebenarnya orang pertama dari HTI yang membawa, mengenalkan, menyebarkan ide-ide HTI di Indonesia. Beliau awalnya tinggal di Australia kemudian bertemu dengan Kyai Abdullah bin Nuh dan diajak ke Bogor, tempat tinggal Kyai Abdullah bin Nuh. Kyai Abdullah bin Nuh ini merupakan ulama yang karismatik dan juga pejuang.” (Fikri, wawancara, 3 Mei 2004)

Aspek internasional ini kemudian ditindaklanjuti oleh aspek domestik yang menopangnya. Di sinilah peran Kyai Abdullah bin Nuh sangat besar bagi perkembangan HTI di Indonesia. Sebagai Kyai yang karismatik ia memiliki nama yang cukup disegani di kalangan santri. Apa lagi pada saat pemikiran HTI sama sekali belum dikenal di Indonesia. Tentunya tanpa dukungan ulama lokal yang terpercaya akan sulit bagi HTI hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terlebih pada saat rezim sangat represif terhadap gerakan yang tidak berasaskan Pancasila.

Hal ini pun kembali disampaikan oleh Fikri bahwa jasa Kyai Abdullah bin Nuh terhadap HTI sungguh besar meskipun beliau hingga akhir hayatnya belum sempat menjadi anggota HTI.

“Beliau tertarik dan merasa klop dengan ide HTI karena HTI itu adalah untuk menyatukan umat. Beliau termasuk sosok orang yang memang sangat menginginkan itu dan begitu ada HTI salah satu seruan umatnya adalah menyatukan umat Islam seluruh dunia *khilafah* maka beliau sangat *respect* kemudian memberikan dukungannya meskipun sampai akhir hayatnya beliau belum sempat menjadi anggota HTI.” (Fikri, wawancara, 3 Mei 2004)

Berdasarkan dukungan ini, setidaknya HTI memiliki suatu modal kepercayaan dalam proses penyebaran ide gerakan. Masuknya HTI ke Surabaya tak lepas dari proses penyebaran ide gerakan awal di kota pertamanya yaitu di Bogor. Ustad Al Baghdadi kemudian menyebarkan ide gerakan HTI kepada

mahasiswa-mahasiswa di Bogor. penyebaran ide gerakan HTI sendiri dilakukan melalui mekanisme *halaqah* atau pengajian kecil. Biasanya pengajian yang hanya berisikan lima orang dengan satu orang tentor. Di dalam *halaqah* ide-ide gerakan HTI disampaikan dan dikajikan bersama.

“Tersebar nya ide gerakan HTI ke seluruh Indonesia termasuk ke Surabaya juga ditopang dengan keberadaan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada saat itu. LDK eksis di hampir setiap kampus di Indonesia. Sekarang dikenal dengan istilah Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI). Sebagaimana yang disampaikan oleh Fikri” (Wawancara, 3 mei 2004),

“Setahu saya pada waktu itu komunikasi lintas kampus sangat aktif. Karena kita dulu kan di Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI). Dan itu ada di tiap kampus. Kalau di ITB ada Masjid Salman, di UGM ada Masjid Shalahudin, di UNAIR ada Masjid Nuruzaman. Ya memang dari sana. Sebenarnya sudah punya *background* mereka-mereka ini aktivis.”

Melalui wadah LDK di masing-masing kampus inilah kemudian ide gerakan HTI bisa menyebar ke seluruh Indonesia, khususnya di Surabaya. Meskipun ide gerakan HTI menyebar luas namun pada saat itu para pengkajinya sendiri belum tahu kalau itu merupakan ide suatu organisasi gerakan yang bernama HTI. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ismail, ketua DPD HTI Surabaya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dr. Ainur Rofiq Al Amin, dosen UIN Sunan Ampel sekaligus mantan aktivis HTI. Beliau mengatakan bahwa waktu itu kajian diadakan secara sembunyi-sembunyi. Biasanya diadakan di sebuah kontrakan yang diserupakan dengan tempat usaha seperti rental komputer atau rental mobil.

Dua LDK besar di Surabaya yaitu LDK Unair dan Unesa menjadi corong utama dalam proses kemunculan gerakan HTI di Surabaya. Baik Fikri dan Ismail Izudin, keduanya merupakan generasi pertama yang memunculkan gerakan HTI di Surabaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa

mereka menyebarkan ide gerakan HTI dari komunikasi antar LDK se Indonesia. Pada saat itu sangat sering antar LDK masing-masing kampus membentuk kajian bersama. Dari sinilah ide HTI yang pertama kali berkembang di Bogor masuk ke Surabaya.

Kisaran tahun 1980an awal merupakan puncak kekuatan rezim Orde Baru. Berbagai macam peristiwa yang menunjukkan negara *vis a vis* dengan gerakan Islami ideologis juga terjadi. Apa lagi pada kisaran tahun itu diberlakukan yang namanya asas tunggal. Maka peristiwa Tanjung Priok pun menjadi pelajaran bagi seluruh aktivisme Islam pada saat itu. Bagi mereka yang secara frontal berhadapan dengan negara maka akan bernasib sama dengan para korban peristiwa Tanjung Priok, dimana demonstrasi Muslim ditembaki oleh tentara.

Hal ini diperparah pula dengan adanya depolitisasi kampus yang dilakukan rezim Soeharto pada saat itu. Aktivisme mahasiswa sengaja dipangkas oleh rezim melalui pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kordinasi Kemahasiswaan (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) tahun 1978. NKK&BKK diberlakukan untuk menghalau aktivisme mahasiswa yang semakin kritis terhadap rezim. Sebut saja peristiwa Malari pada tahun 1947 yang menunjukkan pelawanan terhadap rezim. Disusul dengan demonstrasi dan protes lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap rezim Soeharto.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan NKK & BKK di seluruh kampus di Indonesia, maka matilah aktivisme politik di kampus seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Namun begitu, kondisi ini tidak serta merta membuat gerakan HTI mati seketika. Di Surabaya, aktivisme HTI dalam menyebarkan ide gerakannya tetaplah berjalan. Meskipun nama HTI sendiri tidak pernah muncul di permukaan.

Sebagaimana yang disampaikan Ismail bahwasanya penyebaran ide gerakan HTI di Surabaya pada saat itu memanfaatkan

kan keberadaan dua LDK besar di Surabaya yaitu LDK Unair dan Unesa. Ia pun mengatakan bahwa LDK merupakan suatu keistimewaan dibandingkan dengan organisasi mahasiswa lainnya seperti HMI dan GMNI. Sebab LDK merupakan organisasi intra Kampus yang langsung berada di bawah naungan rektorat kampus dan keberadaannya tidak melanggar kebijakan NKK dan BKK. Gerakan HTI bersifat politik, namun dalam LDK terlihat seperti gerakan dakwah biasa.

Selain itu, Ismail juga mengaku bahwa LDK mendapat sokongan dana dari rektorat. Sehingga LDK merupakan kendaraan yang memudahkan aktivismenya dalam menyebarkan ide gerakan HTI pada saat itu. Tak heran acara-acara besar yang mengumpulkan banyak mahasiswa dalam LDK bisa dilaksanakan.

Ismail mengatakan bahwa dengan bermain di bawah LDK penyebaran ide gerakan HTI khususnya di Surabaya bisa dilakukan dengan aman dan lancar. Fikri pun mengamini pernyataan tersebut bahwasanya situasi pada saat itu tidak kondusif bagi mereka untuk membentuk organisasi HTI seperti sekarang. Pada tahun 1993 bahkan LDK UNAIR sempat mengadakan seminar perbandingan ideologi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Padahal acara semacam ini merupakan hal yang cukup terlarang. Lagi-lagi itu bisa dilakukan di bawah bendera LDK. Ditambah lagi mereka pada saat itu berhasil mendirikan FSLDK yang bisa menyatukan LDK-LDK lain yang ada di Surabaya.

Rezim yang represif tidak serta mematikan gerakan HTI di Surabaya. Berdasarkan pengakuan Fikri menunjukkan bahwa mereka secara rasional melihat struktur peluang politik yang ada. Di saat rezim begitu mengekang maka tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendirikan struktur organisasi formal dan seterbuka sekarang. Bermain di bawah bendera dua LDK besar yaitu LDK Unair dan Unesa merupakan suatu pilihan yang rasional untuk memunculkan dan menjaga eksistensi gerakan.

Perubahan dari bermain di bawah LDK menjadi organisasi formal seperti sekarang ini juga merupakan suatu pembacaan struktur kesempatan politik yang rasional. Ketika rezim Suharto jatuh maka rezim lebih longgar terhadap keberadaan gerakan. Dan benar saja, hingga sekarang sebagai organisasi gerakan di era reformasi, HTI Surabaya tetap eksis. Bahkan bukan hanya sekedar eksis tetapi mengalami perkembangan yang cukup besar. Anggotanya tidak lagi hanya berasal dari kampus saja tetapi juga dari pengusaha, pelajar, warga perumahan, dan lain sebagainya.

McAdam mengatakan bahwa relativitas keterbukaan dan ketertutupan sistem politik adalah faktor kesempatan politik yang paling dominan dalam memengaruhi dan menentukan kemunculan gerakan. Dalam rezim Orde Baru yang sangat tertutup maka sulit kemungkinannya bagi HTI di Surabaya bisa muncul dan berkembang. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan NKK dan BKK. Itu merupakan pembonsaian atau depolitisasi kampus. Oleh karena itu mengharuskan mereka bergerak melalui LDK untuk memobilisasi gerakan secara senyap. Sementara di era reformasi mereka juga diuntungkan dengan sistem politik yang setengah tertutup. Dimana transisi politik yang terjadi masih belum mampu menyerap aspirasi *civil society* sehingga gerakan menjadi alternatif sebagai bentuk partisipasi politik.

Kemampuan negara dalam melakukan represi juga memengaruhi format gerakan yang digunakan. Perubahan rezim dari era Orde Baru ke reformasi merubah kemampuan negara dalam melakukan represi. Reformasi telah melumpuhkan orde baru sehingga memungkinkan bagi HTI di Surabaya melakukan mobilisasi secara formal dan membentuk organisasi formal. Ddalam kasus HTI Surabaya, dua dimensi dalam konsep POS yang cukup dominan, yakni dimensi relativitas keterbukaan dan ketertutupan sistem politik serta kemampuan represi negara. Di sini, hampir tidak terlihat di dalamnya pengaruh elite.

Mobilisasi Gerakan HTI di Surabaya Era Reformasi

Sejak era reformasi tepatnya semenjak tahun 2000, HTI di Surabaya mengalami perubahan format Gerakan. Ketika Orde Baru HTI di Surabaya belumlah menampilkan dirinya sebagai organisasi yang eksis di ruang publik. Barulah tahun 2000 eksistensi HTI Surabaya kepada khalayak mulai ditampilkan. HTI Surabaya memiliki kantor resmi di Ketintang Baru VIII/01, Surabaya. Kantor tersebut menjadi satu dengan struktur kerja Provinsi Jawa Timur.

Rofiq, salah satu informan, yang juga merupakan staf *LAJNA Siyasi* HTI Surabaya waktu awal kali mengenal HTI DI Surabaya pun cukup terkesima dengan jumlah massa yang banyak saat melakukan berbagai macam aksi.

“Apalagi dulu awal-awal kan cukup pengen tau HTI ini kegiatan apa? Gimana kok bisa caranya ternyata ada acara longmarch. Jadi istilahnya mendatangkan masa segitu banyak juga kader-kadernya kebanyakan dan juga simpatisan-simpatisan itu kok bisa, caranya seperti apa?”

Banyaknya masa yang dihadirkan HTI dalam setiap aksi kolektifnya tentu tak lepas dari proses kaderisasi yang dilakukan. Kaderisasi yang dilakukan HTI tak lagi berada di bawah bendera LDK seperti dulu. Dalam proses kedarisasi di era reformasi HTI Surabaya secara langsung menunjukkan identitas dirinya.

Hal senada disampaikan oleh Rofiq bahwasanya ia mengenal HTI di Surabaya sejak SMA dari kakak kelasnya. Pada saat itu ia masih duduk di kelas 1 SMAN 5 Surabaya. Beberapa kakak kelasnya yang kelas 2 dan 3 sudah ada yang menjadi *daris* di HTI Surabaya. Ia mengaku diajak diskusi dengan mereka lalu diperkenalkan dengan ide gerakan HTI. Selain itu ia pun menyatakan bahwa kakak kelasnya tadi pun aktif menempel artikel HTI di sekolahnya. Pada awalnya memang tidak langsung frontal menggunakan identitas HTI, melainkan menggunakan Lembaga Islam Muda. Yaitu lembaga yang

digunakan HTI Surabaya untuk melakukan kaderisasi di tingkat pelajar.

Kaderisasi yang dilakukan HTI Surabaya tidak hanya di tingkat pelajar tetapi juga di tingkat mahasiswa. Dari sejak kemunculannya di Surabaya, mahasiswa atau dunia kampus memainkan peran penting dalam perkembangan HTI Surabaya. Dari jejaring LDKlah HTI bisa hidup dan bertahan di era Orde Baru. Rofiq pun mengatakan bahwa kampus merupakan hal yang istimewa keberadaannya bagi HTI Surabaya. Hal senada disampaikan oleh Toni, ketua *LAJNA* (departemen) Khusus Mahasiswa HTI Surabaya mengatakan,

“Sebenarnya karena karakter mahasiswa. Mahasiswa kan belum tetap pemikirannya. Usia-usia segitu belum tetap pemikiran. Artinya dia belum mengambil suatu pemikiran tertentu. Masih gampang berpindah-pindah. Nah itu mudah menerima ide-ide baru. Dibandingkan dengan katakanlah orang-orang yang tua. Kalau kita menyampaikan ide kan butuh diskusi lebih panjang.”

Kampus yang menjadi incaran HTI di Surabaya pun tidak sembarangan. Beberapa kampus negeri yang ternama menjadi basis penyebaran ide gerakan HTI seperti ITS, Unair, dan Unesa. Hal tersebut memang disengaja. Toni menyatakan bahwa secara pusat, opini politik dan intelektual kampus negeri lebih strategis. Karenanya, kaderisasi di kampus negeri lebih diutamakan oleh HTI Surabaya.

Kaderisasi tingkat mahasiswa di Surabaya berjalan menggunakan organisasi sayap HTI Surabaya yaitu Gema (Gerakan mahasiswa) pembebasan. Rofiq sendiri selain staf di *LAJNA Siyasi* HTI Surabaya, merupakan anggota Gema pula. Meskipun menggunakan GEMA sebagai sayap kaderisasi di kampus, HTI Surabaya tetap tegas menyampaikan identitasnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rofiq,

“Jadi kami jelas ketika mengopinikan, ketika kami merekrut dan sebagainya atas nama HTI seperti itu sedangkan GEMA adalah organisasi mahasiswanya HTI. Jadi bukan sebagai lembaga mantel atau jaket tetapi memang bener resmi.”

Kaderisasi tingkat mahasiswa selain memanfaatkan Gema juga memanfaatkan jejaring pertemanan. Rofiq menyatakan bahwa Gema memang mengadakan acara khusus untuk menjaring kader-kader di mahasiswa. Namun untuk mengajak orang-orang yang ingin di kader inilah jaringan pertemana dimanfaatkan. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi kader atau *daris* di HTI Surabaya mengajak kawan-kawannya untuk mengikuti acara training pembebasan.

Setelah semua proses kaderisasi kampus sampai pada tahap training pembebasan, maka setelah itu para peserta Training ditawarkan untuk mengikuti *halaqah* umum (HU) secara rutin untuk mengenal Islam dalam perspektif HTI. Masih menurut Rofiq, HU merupakan kajian yang bertujuan membuat pesertanya lebih istiqamah lagi ketika masuk ke tahap kajian berikutnya.

Di dalam HU sendiri, yang dibahas tidak murni pemikiran HTI. Ada materi-materi Islam lain yang juga dibahas. Sifatnya lebih ke persoalan dasar, yaitu lebih mengarahkan pesertanya untuk konsisten mengikuti kajian keislaman. HU dilaksanakan bergantung pesertanya. Jika pesertanya dengan mudah menyerap materinya maka tidak sampai seminggu sudah mengikuti tahap kajian HTI yang selanjutnya. Paling lama pengadaan HU yaitu bekisar hingga tiga bulan.

Setelah dirasa cukup masa peserta HU ditawarkan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya sebagai *daris*. *Daris* merupakan orang yang mengkaji ide-ide HTI dalam kitab-kitab yang dikarang oleh pendiri HTI, yaitu Syaikh Taqiyuddin AnNabani. Ada empat kitab yang dikaji oleh *daris* untuk bisa mencapai ke tahapan berikutnya yaitu *hizbiyin*, atau anggota HTI. Empat kitab wajib tersebut ialah *Nidzhomul Islam*, *Takatul Hizbi*, *Mafahim Hizb-ut Tahrir*, dan pilar-pilar penguat *Nafsiyah Islamiyah*. Biasanya *halaqah* diadakan di tempat-tempat seperti di taman kampus atau di masjid kampus.

Selain di kampus dan di sekolah, HTI Surabaya juga melakukan kaderisasi di perumahan dan perkampungan. Rofiq menyatakan, di wilayah perumahan dan perkampungan Surabaya, HTI mengadakan acara dahsyat (*Dauroh Syingkat*) sebagai momen pengenalan kepada warga. Mereka mengajak warga hadir dalam acara tersebut maka para kader HTI Surabaya memanfaatkan jejaring pertemanan. Mereka biasanya mengajak tetangga yang mereka kenal untuk mengikuti acara tersebut. Selepas acara tersebut maka tetangga atau kawan yang diajak ditawarkan untuk mengikuti HU hingga berlanjut menjadi *daris*. Biasanya kajian diadakan di rumah warga yang bersangkutan atau di rumah warga yang bersangkutan atau dirumah *musyrif*.

Selain melakukan kaderisasi di pemukiman HTI Surabaya juga merekrut beberapa ulama atau kyai lokal untuk bergabung menjadi anggota HTI. Hal ini disampaikan oleh Toni bahwa sekarang HTI Surabaya sedang mencoba untuk merekrut beberapa kyai yang memiliki pondok pesantren di Surabaya. Kebanyakan memang kyai yang beraliran Naydliyin (NU). Upaya semacam ini terinspirasi dari HTI Jember. Toni menceritakan bahwa ada salah satu kyai besar di Jember yang didatangi HTI setempat untuk bergabung menjadi anggota HTI. Akhirnya setelah sang kyai bergabung maka turut membawa gerbong para santri di pesantren yang diasuhnya.

Selain melakukan kaderisasi dan kunjungan untuk menyebarkan opini, HTI Surabaya juga melakukan berbagai macam aksi kolektif. Beberapa aksi kolektif yang pernah dilakukan HTI Surabaya di era reformasi antara lain aksi penolakan kedatangan Obama di depan konjen AS, demo kenaikan harga BBM, dan penolakan terhadap kapitalisme.

Sebagaimana biasa, setiap HTI Surabaya mengadakan aksi kolektif senantiasa dibanjiri oleh ribuan kadernya. Dalam mendatangkan kader sebanyak itu, tak lepas dari proses kaderisasi yang telah dijalankan sedemikian rupa. Toni menyatakan bahwa tidak sulit untuk memobilisasi kader-kader

HTI Surabaya dalam melakukan berbagai macam aksi. Para kader mengetahui benar tujuan aksi yang mereka lakukan. Berbekal ide yang sudah tertanam dalam diri kader, maka mereka dengan sendirinya mau turun melakukan aksi kolektif seperti yang tadi disebutkan. Biasanya para *musyrif* yang langsung memberi tahu mereka untuk mengikuti aksi. Para *musyrif* mendapat info mengenai aksi dari struktur DPD HTI Surabaya.

Fikri menyatakan bahwa aksi kolektif yang dilakukan HTI Surabaya, ada yang bersifat reguler maupun aksidental. Aksi reguler diadakan karena tujuan HTI ialah mengedukasi umat dengan ide-ide gerakannya. Harapannya tentu umat simpatik, mendukung, bahkan bergabung menjadi anggota.

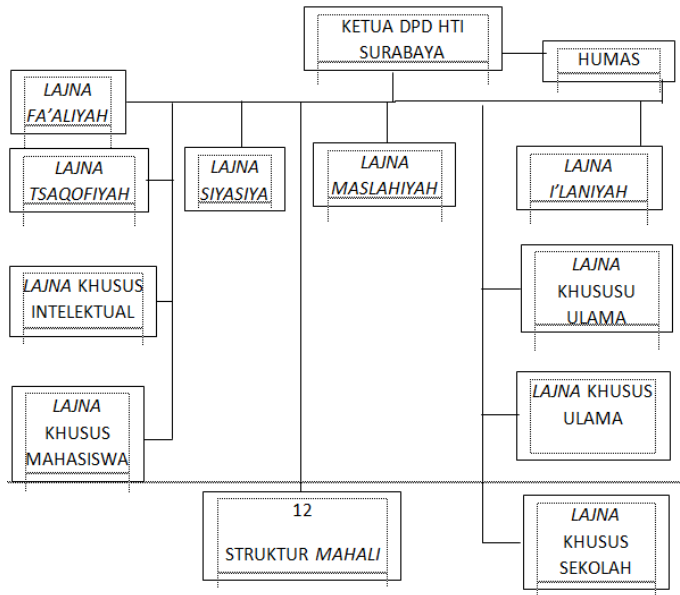
Aksi reguler yang biasa diadakan satu bulan sekali oleh HTI Surabaya misalnya *Halaqah* Islam dan Peradaban (HIP). Acara ini merupakan semacam diskusi yang mengundang berbagai intelektual di Surabaya untuk mengkaji permasalahan sosial lewat perspektif *khilafah*. Sedangkan aksi yang bersifat aksidental dilakukan sesuai kebutuhan. Semisal kedatangan Obama yang mendadak ke Indonesia maka esoknya sebisanya mungkin HTI Surabaya meresponnya dengan mengadakan aksi protes di depan Konjen AS. Hal tersebut bertujuan untuk pembentukan opini publik bahwa kedatangan Obama memiliki motif politis yang menyengsarakan Indonesia, khususnya umat Islam.

Bagaimanapun juga, pembentukan opini publik menjadi penting bagi HTI Surabaya. Hal ini sejalan dengan tahapan HTI yang kedua yaitu berinteraksi dengan umat. Pada tahapan ini selain melakukan kaderisasi HTI juga menyosialisasikan ide-ide pemikirannya kepada khalayak agar ide *khilafah* semakin dikenal dan diterima di masyarakat.

Untuk melakukan aktivitas mobilisasi gerakan seperti kaderisasi dan pembentukan opini di ruang public, HTI Surabaya di tolong oleh struktur keorganisasian. Struktur keorganisasian HTI Surabaya layaknya struktur organisasi

modern. Desain strukturnya menyerupai birokrasi yang memiliki spesifikasi pekerjaan. Rofiq menyatakan bahwa struktur HTI Surabaya selayaknya struktur partai politik. Berikut struktur keorganisasian DPD HTI Surabaya.

Gambar 1
Struktur Kepengurusan DPD HTI Surabaya



Struktur inimenopang mobilisasi HTI Surabaya di era reformasi. Masing-masing fungsi turut mendukung berbagai aktivitas gerakan HTI di Surabaya. Mulai dari kaderisasi hingga aksi kolektif. *LajnaFa'aliyah* bertugas untuk melakukan kunjungan kelembagaan. Instansi yang dikunjungi yaitu kepolisian, jajaran pemkot, dan ormas-ormas yang ada di Surabaya. Ini dilakukan untuk menyebarkan ide gerakan sekaligus membangun opini.

LajnaTsaqofiyah berfungsi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah beserta isu-isu sosial lainnya lewat sudut pandang hukum Islam. Dari situ nanti hasilnya akan ditulis di media HTI Surabaya kemudian disebarluaskan kepada kha-

layak. *Lajna Siyasi* berfungsi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan politik pemerintah lalu diungkap kepentingan politik dibalik itu. Salah satunya semisal mengenai kedatangan Obama. Maka *Lajna Siyasi* membongkar kepentingan politik AS yang senantiasa merugikan Indonesia dan umat Islam.

Lajna Maslahiyah berfungsi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan perekonomian dan sosial pemerintah lalu dibahas dalam sudut pandang Islam. Hasil pembahasan itu juga ditulis di media HTI Surabaya lalu disebarluaskan kepada masyarakat. Berikutnya *Lajna Ilmiah* yang berfungsi sebagai departemen informasi dan komunikasi. Fikri mengatakan bahwa *Lajna* ini mirip dengan departemen penerangan yang memberikan keterangan pers kepada media massa. Hal tersebut ditunjang struktur humas yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal.

Selain itu ada pula *Lajna* yang khusus mengurus berbagai segmen yang ditarget oleh HTI Surabaya untuk menjadi anggota. Ada *Lajna* yang khusus mengurus ulama, intelektual, siswa sekolah, mahasiswa, dan pengusaha. Yang dimaksud intelektual ialah para dosen dan beberapa pemikir lain di Surabaya.

Meskipun ada *Lajna* yang secara khusus mengkader segmen yang ditargetkan oleh HTI Surabaya, namun manajemen pengkaderan dan pemobilisasian berada pada struktur *mahali* atau struktur setingkat kecamatan. Di Surabaya terdapat dua belas *mahali*. Namun tidak harus satu kecamatan menjadi satu *mahali*. Realitasnya di Surabaya ada beberapa kecamatan yang bergabung menjadi satu *mahali*. Hal ini disebabkan masih minimnya infrastruktur di kecamatan tersebut dan kurangnya jumlah orang di sana.

Toni menyatakan bahwa untuk pembentukan satu *mahali* minimal dibutuhkan sepuluh *halaqah* dengan rata-rata berisi lima orang. Masing-masing *mahali* diketuai oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab mengontrol berjalannya

fungsi organisasi. Masing-masing kordinator *mahali* langsung bertanggung jawab kepada ketua DPD HTI Surabaya.

Di bawah *mahali* ialah para *musyrif*. Sehingga kordinator *mahali* langsung mengontrol para *musyrif* berkaitan dengan kaderisasi, pembinaan, dan mobilisasi aksi karena melalui para *musyrif* segala informasi diberikan. Jika ada *halaqah daris* maupun *hizbiyin* yang bermasalah maka *musyrif* akan dievaluasi oleh koordinator *mahali*.

Dalam hal pendanaan seluruh informan mengatakan bahwa dalam AD/ART HTI tidak memperbolehkan menerima pendanaan dari pihak eksternal. Artinya HTI Surabaya pun hanya mengandalkan para kader dalam hal pendanaan. Toni menyebutkan memang diadakan iuran wajib bagi seluruh kader. Hanya saja ia tidak mengatakan besaran nominalnya. Hal senada juga disampaikan oleh Fikri, Ismail, dan Rofiq.

Framing Islam Adalah Solusi

HTI memandang Islam lebih dari sekedar agama seperti Kristen, Hindu dan Budha. Fikri sendiri menyatakan bahwa yang dimusuhi oleh HTI bukan agama seperti Hindu, Kristen, dan Budha. Yang dimusuhi oleh HTI ialah kapitalisme, sekularisme, dan sosialisme. Sebab agama-agama seperti Kristen, Hindu, dan Budha hanya memiliki aturan spiritual saja yang menghubungkan antara Tuhan dan hambanya.

Berbeda dengan Islam yang selain memiliki aturan spiritual juga memiliki aturan kehidupan sosial. Dalam bidang ekonomi misalnya, Islam memiliki perangkat aturan ekonomi syariah. Dalam politik Islam memiliki perangkat kenegaraan seperti *khilafah*. Inilah yang menjadikan Islam bukan seperti agama lainnya. Islam memiliki konsep kehidupan yang lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu HTI menjadikan Islam sebagai ideologi.

Tidak ditegakannya hukum Islam di masyarakat mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan lain. Toni mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan seperti

kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya terjadi semata-mata karena absennya hukum Islam di masyarakat. Oleh karena itu HTI mencoba menghadirkan kembali Islam di tengah masyarakat. Upaya memunculkan kembali Islam di tengah masyarakat hanya dapat berjalan dengan adanya instrumen negara. Dan hanya sistem *khilafah*lah yang mampu mengakomodasi syariah secara kontinu dan pasti. Toni menyatakan bahwa Islam sebagai ideologi merupakan suatu kemutlakan untuk diterapkan.

Dalam kerangka teori McAdam, suatu gerakan akan berjalan jika para aktornya telah melalui proses atribusi yang sama. Mereka memiliki pemaknaan yang sama akan kondisi sosial sehingga mereka bersatu padu menyatukan gerak untuk memperjuangkan harapan mereka. Proses semacam inilah yang kemudian diistilahkan dengan konsep *framing*.

HTI Surabaya membangun kesadaran para kadernya dengan menghasilkan pemaknaan-pemaknaan kondisi sosial melalui basais religi. Dalam pendekatan perspektif *framing*, Benford dan Snow memperkenalkan sekaligus mendetailkan tahapan dalam proses *framing*. *Pertama, diagnostik framing* yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan siapa yang menjadi penyebabnya. *Kedua, prognostic framing* yakni solusi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. *Ketiga, motivasional framing* yakni proses psikologis untuk mengajak para aktor gerakan bergerak melakukan berbagai macam aktivisme gerakan. Ketiga hal inilah yang juga dilakukan HTI Surabaya dalam membentuk kesadaran psikologis seluruh kadernya.

Di dalam *diagnostic framing*, merupakan proses di mana HTI menjadikan masalah utama di masyarakat saat ini ialah tercerabutnya ideologi Islam dari masyarakat. Dengan absennya Islam di tengah-tengah masyarakat, maka permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, korupsi, dan pergaulan bebas pun muncul. Penggolongan faktor internal dan eksternal oleh HTI Surabaya pada akhirnya memunculkan pihak yang

menjadi penyebab terjadinya masalah ini yaitu keberadaan isme-isme selain Islam seperti liberalisme dan sosialisme

Dalam hal ini, HTI Surabaya sepakat bahwasanya yang menjadi isme terbesar di masyarakat khususnya di Indonesia ialah liberalisme dengan representator utamanya yaitu AS. Fikri sendiri menyampaikan bahwa dalam komunikasi harus ada aktor yang dituju dan dalam hal ini AS menjadi pihak yang layak untuk dituju.

Penggunaan AS sebagai simbol yang dilawan bagi Fikri bukan tanpa sebab. Ia menyampaikan bahwa AS memiliki bukti-bukti nyata dengan serangkaian keterlibatan dalam menjajah umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesia. Invasi AS ke beberapa negara Islam secara nyata telah menghasilkan korban dari kalangan umat Islam. Di samping invasi AS juga melakukan penjajahan secara ekonomi terhadap Indonesia. Keberadaan Freeport dan perusahaan-perusahaan AS lainnya di Indonesia misalnya, tidak lebih dari upaya AS untuk menyedot SDA Indonesia dan menjajah perekonomian Indonesia. Itu sebabnya HTI Surabaya sangat responsif dengan kedatangan Obama ke Indonesia. Begitu Obama datang biasanya HTI Surabaya melakukan aksi penolakan di depan Konjen AS.

Tahapan selanjutnya yaitu *prognostic framing*. Dalam tahapan ini HTI menjadikan penegakan syariat dan *khilafah* sebagai solusi. Dengan kata lain menjadikan Islam sebagai solusi. Islam dijadikan sebagai solusi seluruh permasalahan sosial sebenarnya merupakan kekhasan dari gerakan revivalisme Islam ala Timur Tengah. Hal ini tak perlu diherankan, sebab HTI lahir dari Timur Tengah dan memiliki cita-cita revivalisme Islam. Kekhasan gerakan revivalisme Islam lainnya ialah senantiasa bersifat politik. Artinya, gerakan yang dilakukan mengarah kepada perebutan kekuasaan politik, mengganti otoritas lain dengan otoritas Islam.

Tahapan berikutnya, partisipan gerakan diminta untuk mau mengikuti solusi yang ditawarkan oleh HTI, yaitu

motivasional framing. Rofiq menyatakan bahwa yang menjadi motivasi utama kader-kader HTI dalam melakukan setiap aktivisme politiknya ialah kebanggaan ketika syariat dan *khilafah* tegak. Kebanggaan tersebut muncul karena merupakan upaya bersama seluruh umat Islam yang ada. Di sini bisa dilihat bahwasanya kebanggaan identitas keislaman menjadi motivasi bersama seluruh kader HTI Surabaya.

Penutup

HTI Surabaya melakukan hal yang sejalan dengan konsep POS. Di saat rezim yang represif maka mereka bergerak secara senyap. Sebaliknya ketika rezim yang tak lagi represif dan sistem politik masih lambat dalam menyerap aspirasi maka mereka muncul secara terang-terangan dan menjadi alternatif bentuk partisipasi politik warga Surabaya, terutama mereka yang tergolong religius.

Kemudian, dalam memobilisasi gerakannya di era reformasi, HTI menggunakan format organisasi gerakan sosial formal. Artinya, gerakan dimobilisir lewat struktur aktivisme gerakannya, yaitu mengganti pemikiran sekuler dan liberal yang bercokol di tengah umat dengan ideologi Islam. Tidak hanya itu, upaya menyusupi sumber daya organisasi lain pun dilakukan demi memperkuat struktur organisasi gerakan formalnya. HTI Surabaya juga membangun sistem kaderisasi yang ketat untuk mengamankan organisasi gerakan dari para *free rider* yang hanya mengincar insentif semata.

Dalam membangun kesadaran dan atribusi sosial para anggotanya HTI Surabaya melakukan *framing* yang memposisikan Islam sebagai religio politik. Artinya Islam bukan hanya agama ritual namun sebuah ideologi yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat, di mana umat Islam tak perlu berkompromi dengan sistem-sistem barat yang haram untuk diterapkan. Inilah yang menjadi alasan para anggota bergabung ke dalamnya.

Keberadaan HTI di Indonesia, khususnya di Surabaya memang menjadi paradoks dalam demokrasi. Sebab ke-

beradaannya justru malah ingin menumbangkan demokrasi. Namun ia sendiri dengan memanfaatkan demokrasi dimana kebebasan berpendapat dijamin. Terlebih demokrasi di Indonesia yang belum mapan menjadi sasaran empuk HTI untuk menyudutkannya. Demokrasi yang transaksional dan dibajak oleh para plutokrat pada akhirnya akan terus memperburuk citra demokrasi dan menjadi kesempatan bagi kelompok Islam fundamental yang *vis a vis* dengannya.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Hafidz. 1998. *Islam : Politik dan Spiritual*. Singapura: Lisan al-Haq.
- Arifin, Syamsul. 2005. *Ideologi dan praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*. Malang: UMM Press.
- Bubalo, Anthony and Greg Fealy. 2005. *Joining The Caravan? The Middle East, Islamism, and Indonesia*. Australia: Lowy Institute for International Policy.
- Della Porta, Donatella and Mario Diani. 2006. *Social Movement: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta: Mizan.
- Herriot, Peter. 2007. *Religious Fundamentalism and Social Identity*. New York: Routledge.
- Hilmy, Masdar. 2009. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kanisius.
- Karagiannis, Emanuel. 2005. *Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan*. *Jurnal Religion, State, and Society*, vol.33 No.2, pp. 138-149.
- Machmud, Yon. 2006. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: ANU Press.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- McAdam, Doug. 1982. *Political Process and The Development of Black Insurgency*. Chicago: The University of Chicago Press.
- McAdam, Doug, John D McCarthy, and Mayer N Zald. 1996. *Comparative Perspective on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Munson, Ziad. 2001. *Islamic Mobilization: Social Movement Theory and The Egyptian Muslim Brotherhood*. Jurnal The Sociological Quarterly, vol.42 No.4 pp. 487-510.
- Roy, Olivier. *Gagalnya Islam Politik*. Jakarta: Serambi.
- Said Ali, As'ad. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Snow A, David and Sarah A Soule. 2010. *A Primer on Social Movement*. New York: WW Norton & Company.
- Snow, David A, Sarah A Soule and Hanspeter Kriesi. *The Blackwell Companion to Social Movement*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Tilly, Charles. 2004. *Social Movement, 1768-2004*. London : Paradigm Publisher.
- Wictorowicz, Quintan. 2012. *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Study Kasus*. Yogyakarta: Gading Publishing.

Majalah dan Internet

<http://www.hizbuttahrir.or.id>

Al Wa'ie, Edisi 55 Maret 2005.